

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BERDASARKAN PERMENDES NO. 9 TAHUN 2016
TENTANG PELATIHAN MASYARAKAT UNTUK MEMBENTUK KEMANDIRIAN
MASYARAKAT**

(Studi di Desa Pesangrahan Kota Batu)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

ADMINISTRASI PUBLIK



Disusun Oleh:

IRVAN SUSANTO

2017210072

**KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI**

MALANG

2021

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BERDASARKAN PERMENDES NO. 9 TAHUN 2016 TENTANG PELATIHAN MASYARAKAT UNTUK MEMBENTUK KEMANDIRIAN MASYARAKAT

Ringkasan

Kebijakan publik yang merupakan bagian dari kewajiban pemerintah dalam menegakkan dan menjaga kedaulatan suatu negara tidak terpengaruh dan bergantung pada negara lain, yaitu salah satu alasan kenapa kebijakan dipandang penting. Kemudian pada dasarnya implementasi merupakan langkah-langkah yang dilaksanakan untuk mewujudkan kebijakan yang efektif. Kemandirian masyarakat adalah suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kemampuan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu jumlah kemiskinan Desa Pesanggrahan sebanyak 229 keluarga, kemudian nilai pengangguran atau tidak berkerja sebanyak 1.523 dan pemasaran yang mengalami kendala. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus dari masalah yang diteliti yaitu implementasi kebijakan model implementasi yang digunakan yaitu model Merilee.S.Grindle dan Implementasi Kebijakan Berdasarkan PERMENDES No. 9 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Masyarakat dalam Membentuk Kemandirian Masyarakat. Sampel Sumber Data menggunakan *Snowball Sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menunjang pelaksanaan kebijakan yang efektif Desa Pesanggrahan melaksanakan pelatihan masyarakat yaitu pelatihan MC, kerajinan janur, pelatihan membuat olahan susu sapi. Untuk menunjang hal tersebut langkah yang diambil oleh pemerintah Desa Pesanggrahan sangat tepat yaitu dengan berkoordinasi mulai dari atas sampai paling bawah dengan demikian maka masyarakat mempunyai rasa dihargai. Faktor penghambatnya adalah bahwa masyarakat menganggap setelah pelatihan tidak ada kelanjutan, pemasaran yang mengalami kesulitan, keterbatasan alat dan beberapa prodak hanya diproduksi ketika ada acara saja.

Kata Kunci : Kebijakan, Pelatihan, Grindele

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan publik yang merupakan bagian dari kewajiban pemerintah dalam menegakkan dan menjaga kedaulatan suatu negara tidak terpengaruh dan bergantung pada negara lain, yaitu salah satu alasan kenapa kebijakan dipandang penting. Maka dari itu ketika suatu kebijakan itu tidak kokoh maka akan berdampak pada masyarakat atau negara. Menurut Wibawa (dalam Setyawan, 2017) Kebijakan merupakan suatu ketetapan yang diagendakan oleh pemerintah harus mengikutsertakan seluruh elemen dari pusat sampai tingkat paling bawah yaitu lembaga organ suatu negara. Dengan melibatkan seluruh tatanan atau elemen pemerintah jadi keputusan yang dibuat dapat berjalan dengan efektif dan efisien tentunya dengan melihat kebutuhan dari masyarakat. Komponen tersebutlah yang menjadi kelemahan dimana dalam pembuatan kebijakan seringkali pemimpin tidak melihat kondisi lingkungan atau sumber daya yang ada sehingga menimbulkan permasalahan baru. Kemudian dijelaskan menurut Santoso (dalam Setyawan, 2017) mengemukakan dalam setiap pembuatan suatu kebijakan publik memiliki satu sumber yaitu kepentingan umum.

Beberapa orang awam banyak yang mengartikan bahwa implementasi hanya suatu proses atau pelaksanaan kebijakan akan tetapi jika dipelajari secara kompleks ada makna yang cukup luas. Menurut Santoso (dalam Langkai, 2020) pada dasarnya implementasi merupakan langkah-langkah yang dilaksanakan untuk mewujudkan kebijakan yang efektif. Implementasi kebijakan ditekankan pada pelaksanaannya sesuai dengan tujuan awal dari kebijakan yang sudah disepakati dalam suatu tindakan-tindakan sementara. Kemudian implementasi akan berjalan secara baik ketika memiliki perencanaan yang matang. Jika perencanaan mendukung hingga 60% akan nilai keberhasilannya dizaman saat ini maka kesejahteraan akan dicapai dimasa mendatang tentunya dalam hal tersebut harus konsisten dalam menjalankan kebijakan

tersebut. Nilai 60% tersebut akan hilang bila nilai 40% pelaksanaan atau implementasi kebijakan tersebut tidak konsisten sesuai dengan perencanaan. Beberapa penelitian menemukan bahwa nilai konsisten dengan perencanaan dalam implementasinya hanya menemukan 10-20% nilai tersebut bisa dikatakan jauh dari target yang ingin dicapai. Maka pada tahap implementasi inilah yang rentan dengan permasalahan sehingga tahap ini butuh pengawasan yang lebih ketat.

Kebijakan Pelatihan masyarakat pada dasarnya yaitu untuk membangun kreativitas dan menumbuhkan perekonomian desa sehingga akan terciptanya desa mandiri. Dalam PERMENDES No. 9 Tahun 2016 pasal 1 Tentang Pelatihan Masyarakat. Pada pasal tersebut dijelaskan pada dasarnya untuk menciptakan kemandirian baik itu individu maupun Desa atau Daerah dan meningkatkan perkonomian. Kemudian juga dalam pasal 2 dijelaskan derajat perubahan yang diinginkan sangatlah kompleks atau menyeluruh dimana mendorong masyarakatnya untuk lebih produktif dan untuk menciptakan kemandirian. Selanjutnya dalam penelitian dijelaskan pelatihan masyarakat merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat atau memaksimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah yang dalam masyarakat, termasuk seorang yang mengalami masalah kemiskinan.(Karunia. 2019. JISIP, Vol. 8 No. 4)

Salah satu target utama dari pelatihan masyarakat yaitu kemandirian masyarakat atau individu. Kemandirian masyarakat adalah suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi menemukan solusi masalah- masalah yang dihadapi dengan menggunakan daya kemampuan yang dimiliki. Daya kemampuan yang dimaksud yaitu kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan efektif setra sumber daya lainnya

Kebijakan pelatihan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pesanggrahan guna untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dan mandiri. Desa Pesanggrahan

merupakan desa yang memiliki letak strategis berada di tengah perkotaan. Desa Pesanggrahan merupakan penghasil susu sapi segar terbesar di Kota Batu, tepatnya di Dusun Toyomerto (media: Malang News). Dan pemerintah desa melakukan atau melaksanakan pelatihan masyarakat disekitar karena melihat potensi yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu jumlah kemiskinan Desa Pesanggrahan sebanyak 229 keluarga, kemudian jumlah nilai pengangguran atau tidak berkerja sebanyak 1.523 (media : Desa Pesanggrahan) dan pemasaran yang mengalami kendala. Dimana seharusnya kebijakan tersebut dapat membantu pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Dengan adanya potensi desa yang besar menjadikan salah satu target utama dalam mengembangkan kapasitas masyarakat dengan pelatihan masyarakat itu sendiri. Sehingga akan mudah untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Sesuai dengan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Berdasarkan PERMENDES No. 9 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Masyarakat Untuk Membentuk Kemandirian Masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan berdasarkan PERMENDES No. 9 Tahun 2016 tentang pelatihan masyarakat untuk membentuk kemandirian masyarakat?
2. Apa yang menjadi faktor penyebab ketidak efektifan pelatihan masyarakat yang dilaksanakan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tentunya dalam penelitian memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, tujuan tersebut sebagai berikut :

1. Mengetahui implementasi kebijakan berdasarkan PERMENDES No. 9 Tahun 2016 tentang pelatihan masyarakat untuk membentuk kemandirian masyarakat.

2. Mengetahui faktor penyebab ketidak efektifan pelatihan masyarakat yang dilaksanakan.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Dalam penulisan ini diharapkan mempunyai manfaat bagi pembaca tentang teori yang ada dalam penelitian ini dengan judul Implementasi Kebijakan Berdasarkan PERMENDES No. 9 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Masyarakat Untuk Membentuk Kemandirian Masyarakat.

- b. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pembaca berupa ilmu pengetahuan dan wawasan tentang Implementasi Kebijakan Berdasarkan PERMENDES No. 9 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Masyarakat Untuk Membentuk Kemandirian Masyarakat.

- c. Manfaat Praktis

Pada manfaat ini diharapkan pembaca mampu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, kemudian mengetahui Implementasi Kebijakan Berdasarkan PERMENDES No. 9 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Masyarakat Untuk Membentuk Kemandirian Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2018. *Perencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu 2018-2022*. <http://www.batukota.go.id>. (Online, Diakses pada tanggal 19 Oktober 2020, pukul 17:22)
- Anonim. *Kemandirian*. <http://www.perpustakaan.uns.ac.id>. (Online, Diakses pada tanggal 20 Mei 2021, pukul 15:48)
- Anonim. *Kemandirian Masyarakat*. <http://www.digilib.uinsby.ac.id>. (Online, Diakses pada tanggal 20 Mei 2021, pukul 17:48)
- Budi, Dimas, dkk. 2018. *Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Keterampilan Dasar*. Jurnal Penelitian Pendidikan. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1 No.5, Hal. 862-871.
- Hanafi, dkk. 2018. *Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1 No.5, Hal. 188-196.
- Hesti Wardhani, Christova. 2015. *Manajemen Penyelenggaraan Program Pelatihan Masyarakat*. Jurnal Wacana, Vol. 18, No.1.
- Hidayat, Nur. *Pedoman Pelatihan Masyarakat*. <http://www.upi.edu>. (Online, Diakses pada tanggal 20 Oktober 2020, pukul 22:48)
- Karunia Eka, Wilda. 2019. *Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP).Vol. 8 No 2.
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo : UNG Press.
- Langkai, Jeane E. 2020. *Kebijakan Publik*. Malang: CV.Seribu Bintang.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Setyawan, Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang : CV. Citra Intrans Selaras.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : CV.Afabeta.
- Sutarto, Joko. dkk. 2018. *Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Kecakapan hidup Berbasis Keunggulan Lokal Desa Wisata Mandiri*. Jurnal Penelitian Pendidikan, Vol.35 No 1.
- Parjan. Dkk. 2020. *Kecamatan Batu Dalam Angka 2020*. Kota Batu : BPS Kota Batu.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Masyarakat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu